

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tata kelola dana pendidikan yang baik merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang berkualitas, khususnya pada tingkat Sekolah Negeri Menengah Atas Negeri. Salah satu pilar utama dalam tata kelola yang baik adalah transparansi keuangan, yang menuntut keterbukaan informasi keuangan sekolah agar dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh berbagai pihak terkait secara akurat dan tepat waktu. Keterbukaan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga mendorong pengelolaan dana yang lebih efisien dan bertanggung jawab (Nurul Habibatulloh et al., 2022).

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Sanjaya et al., 2025). Dana pendidikan yang dikelola secara transparan dan akuntabel tidak hanya memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi Pendidikan (Nurul Habibatulloh et al., 2022). Transparansi keuangan menjadi pilar utama dalam tata kelola yang baik, karena dengan keterbukaan informasi keuangan, berbagai pihak terkait mulai dari pemerintah, guru, orang tua siswa, hingga masyarakat luas dapat mengakses, memahami, dan mengawasi penggunaan dana secara tepat waktu dan akurat. Hal ini sangat penting untuk mencegah potensi

penyalahgunaan dana serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan sekolah (Adzkia et al., 2024).

Pada acara festival Anti-Korupsi di Gedung Graha Sabha Pramana, Universitas Gajah Mada tahun 2014 dalam pidatonya, Presiden Jokowi memerintahkan semua daerah harus membuat sistem *E-Budgeting* (Rahma & Rani, 2023). Sistem itu berlaku untuk pemerintahan pusat maupun daerah. Karena pada saat itu maraknya tindak korupsi dengan menerapkan sistem *E-Budgeting* bisa dengan mudah mengontrolnya dan diharapkan bisa mencegah korupsi.

Era penganggaran berbasis digital disebut *e-budgeting* ialah suatu sistem digital penganggaran yang berbasis *software* atau program untuk memfasilitasi proses penganggaran dengan tujuan mempermudah pelaksanaan dari kegiatan penganggaran dan perencanaan (Vanda, 2020). *E-Budgeting* bertujuan untuk mesystemwujudkan salah satu program pemerintah, yaitu kejujuran. Setiap instansi pemerintah wajib menjaga integritasnya (Rahma & Rani, 2023).

*E-budgeting*, yaitu sistem penganggaran berbasis elektronik yang dirancang untuk mengintegrasikan proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pemantauan anggaran secara lebih terbuka dan akuntabel. Keberhasilan sistem ini, bagaimanapun, tidak berdiri sendiri. Efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh dua faktor krusial lainnya: akuntabilitas pengelola dana dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akuntabilitas memastikan bahwa aparatur sekolah memiliki pertanggungjawaban yang jelas dalam mengelola dana pendidikan sesuai dengan regulasi dan etika sementara partisipasi *stakeholder* yang mencakup guru,

komite sekolah berperan sebagai mekanisme pengawasan dan evaluasi eksternal (Rihan Mustafa Zahri, 2020).

*E-Budgeting* di sekolah negeri Kota Tasikmalaya saat ini menggunakan ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) untuk mendukung tata Kelola dana BOS yang akuntabel. Penerapan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) sangat penting dalam pengelolaan dana BOS, organisasi sekolah akan kesulitan menempatkan dana BOS jika tidak menggunakan aplikasi tersebut (Arifudin, 2025).

Namun, pemerintah daerah masih berhadapan dengan berbagai kendala dalam proses implementasi sistem *e-budgeting*. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran. Banyak aparatur sekolah maupun staf administrasi keuangan yang masih mengalami kesulitan dalam memahami alur kerja aplikasi *e-budgeting* serta mekanisme pelaporan digital yang terintegrasi. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan teknis yang berkelanjutan dan kurangnya pendampingan dari instansi terkait dalam proses transisi menuju sistem penganggaran berbasis elektronik (Amrih, 2025).

Di sisi lain, aspek akuntabilitas keuangan sekolah juga masih menjadi sorotan publik. Di samping dukungan teknologi, faktor fundamental seperti akuntabilitas memegang peranan yang tidak kalah penting. Akuntabilitas sebagai kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya (Ridhawati & Gorontalo, 2025). Dalam konteks sekolah,

kepala sekolah dan tim manajemen keuangan memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan setiap dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat akuntabilitas yang tinggi akan secara langsung mendorong praktik pengelolaan keuangan yang lebih transparan.

Selain itu, proses akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat sekolah juga kerap menghadapi kendala dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Beberapa sekolah masih bergantung pada sistem manual dalam penyusunan laporan keuangan, yang berpotensi menimbulkan keterlambatan dan kesalahan administrasi (Nurul Habibatulloh et al., 2022).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan bukan hanya soal memastikan dana di sekolah dikelola secara tepat, tetapi juga menjaga tanggung jawab moral terhadap seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pihak yang berkepentingan, baik secara administratif maupun sosial. Kajian terbaru menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi memainkan peran sentral dalam efektivitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Sudyartini & Wafa, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem *e-budgeting* telah diterapkan secara bertahap di lingkungan pendidikan Kota Tasikmalaya, efektivitasnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan masih belum sepenuhnya optimal. Diperlukan sinergi antara pihak sekolah, pemerintah

daerah, dan masyarakat dalam memperkuat budaya transparansi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar pengelolaan keuangan sekolah dapat berjalan sesuai prinsip *good governance* (Nuriyawati et al., 2025).

Tata kelola yang baik atau *good governance* apabila sistem tersebut memberikan informasi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, produktif dalam melayani dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Rihan Mustafa Zahri, 2020). Selanjutnya, sekolah sebagai entitas publik tidak dapat dilepaskan dari peran para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Keterlibatan berbagai pihak menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif. Menurut Wahyuni & Maison (2022) *stakeholder* adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Dalam lingkup sekolah, *stakeholder* mencakup guru, orang tua siswa, komite sekolah, hingga masyarakat. Partisipasi aktif mereka dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, sejalan dengan konsep *good governance*, dapat mendorong pihak sekolah untuk lebih berhati-hati dan terbuka dalam mengelola keuangan karena adanya pengawasan langsung.

Berdasarkan data dari Open Data Kota Tasikmalaya (2024), terdapat sepuluh Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Tasikmalaya, seperti yang ditunjukkan Tabel 1.1. Setiap sekolah memiliki karakteristik dan kondisi lingkungan yang sangat berbeda, baik dari segi jumlah siswa, tenaga pendidik, maupun sumber daya yang dimiliki. Perbedaan tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabilitas agar dana yang diterima baik dari pemerintah maupun sumber lain, dapat

dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dengan jumlah sekolah negeri yang cukup banyak, penerapan sistem *e-budgeting* menjadi sangat penting untuk membantu proses perencanaan dan pengawasan anggaran secara digital, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan transparansi publik. Selain itu, keterlibatan partisipasi *stakeholder* seperti kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam perencanaan dan evaluasi anggaran juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah di Kota Tasikmalaya.

**Tabel 1. 1**

**Daftar SMAN Kota Tasikmalaya**

| No | Nama Sekolah        | Alamat                        |
|----|---------------------|-------------------------------|
| 1  | SMAN 1 TASIKMALAYA  | JL. RUMAH SAKIT UMUM NO. 28   |
| 2  | SMAN 2 TASIKMALAYA  | JL. R.E. MARTADINATA NO.261   |
| 3  | SMAN 3 TASIKMALAYA  | JL. LETKOL BASIR SURYA NO.89  |
| 4  | SMAN 4 TASIKMALAYA  | JL. LETKOL RE. DJAELANI       |
| 5  | SMAN 5 TASIKMALAYA  | JL.TENTARA PELAJAR NO. 58     |
| 6  | SMAN 6 TASIKMALAYA  | JL. CIBUNGKUL                 |
| 7  | SMAN 7 TASIKMALAYA  | JL. AIR TANJUNG NO. 25        |
| 8  | SMAN 8 TASIKMALAYA  | JL. MULYASARI NO. 3 TAMANSARI |
| 9  | SMAN 9 TASIKMALAYA  | JL. LEUWIDAHU NO. 61          |
| 10 | SMAN 10 TASIKMALAYA | JL. KARIKIL MANGKUBUMI        |

Sumber: Open Data Kota Tasikmalaya (data diolah)

Sumber pendanaan sekolah sebagian besar berasal dari pihak luar, yaitu dari pemerintah yang bersumber dari dana APBN/APBD berupa dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), serta dari pihak luar lainnya terutama orang tua siswa berupa sumbangan pendidikan (SPP). Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan (Wahyuni & Maison, 2022).

Dalam konteks institusi pendidikan, transparansi berarti keterbukaan dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumber dana lainnya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN). Keterbukaan ini menjadi krusial untuk membangun kepercayaan publik, mencegah potensi penyelewengan dana, dan memastikan sumber daya keuangan digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu inovasi untuk mendorong transparansi adalah melalui adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah telah menginisiasi sistem penganggaran elektronik atau *e-budgeting* (Nurul Habibatulloh et al., 2022).

Transparansi keuangan sekolah masih menjadi persoalan krusial di berbagai daerah, termasuk Kota Tasikmalaya. Meskipun sistem *e-budgeting* melalui aplikasi ARKAS telah diterapkan, laporan keuangan sekolah sering kali tidak dipublikasikan secara terbuka kepada seluruh *stakeholder*. Orang tua siswa dan masyarakat masih kesulitan mengakses informasi detail mengenai penggunaan dana BOS, sehingga menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas sekolah. Transparansi yang tinggi tidak hanya menjamin keterbukaan informasi keuangan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, meningkatkan partisipasi *stakeholder*, serta mendorong terwujudnya prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana pendidikan (Cahya Wardani &

Isnowati, 2025). Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh penerapan e-budgeting, akuntabilitas, dan partisipasi *stakeholder* terhadap transparansi keuangan menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan, guna memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan sekolah di Kota Tasikmalaya.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah menuntut keterbukaan penuh atas proses perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran. Namun, dalam praktiknya masih sering dijumpai keterlambatan penyusunan laporan, akses informasi yang terbatas, serta rendahnya keterlibatan publik dalam pengawasan. Kondisi ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Oleh karena itu, penyediaan informasi yang jelas, akurat, mudah diakses, serta laporan keuangan yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan (Cahya Wardani & Isnowati, 2025).

Kurangnya transparansi di sekolah tidak hanya soal laporan administrasi, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat, keadilan akses pendidikan, dan integritas sistem pendidikan secara keseluruhan. Misalnya, praktik pungutan liar saat PPDB atau ketidakjelasan penggunaan dana BOS dapat merusak kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Survei menunjukkan adanya kasus *pungli* saat penerimaan siswa baru, memberi suap untuk diterima di sekolah, dan laporan keuangan yang tidak terbuka sebagai sebagian dari fenomena integritas rendah di sekolah (*Survei KPK 2022: Ekosistem Pendidikan Belum Mendukung Internalisasi Nilai Integritas*, n.d.).

Berdasarkan latar belakang masalah dan research gap yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh penerapan *e-budgeting*, akuntabilitas, dan partisipasi *stakeholder* berjudul **“Pengaruh Penerapan *E-budgeting*, Akuntabilitas, dan Partisipasi *Stakeholder* terhadap Transparansi Keuangan di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Tasikmalaya”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka peneliti membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *E-budgeting*, Akuntabilitas, Partisipasi *Stakeholder*, Transparansi keuangan di SMA Negeri di Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh secara Bersama-sama *E-budgeting*, Akuntabilitas, dan Partisipasi *Stakeholder* pengelolaan keuangan terhadap transparansi keuangan di SMA Negeri di Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh Parsial *E-budgeting*, Akuntabilitas, dan Partisipasi *Stakeholder* terhadap transparansi keuangan di SMA Negeri di Kota Tasikmalaya.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *E-budgeting*, Akuntabilitas, Partisipasi *Stakeholder*, dan Transparansi Keuangan di SMA Negeri di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara Bersama-sama antara *E-budgeting*, Akuntabilitas, dan Partisipasi *Stakeholder* terhadap Transparansi Keuangan di SMA Negeri di Kota Tasikmalaya.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh parsial *e-budgeting*, akuntabilitas, dan partisipasi *stakeholder* terhadap transparansi keuangan di SMA Negeri di Kota Tasikmalaya.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

#### 1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik dan manajemen pendidikan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi transparansi keuangan di institusi pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi fundamental dan sumber data awal yang valid untuk melakukan kajian sejenis dengan ruang lingkup yang lebih luas atau dengan variabel penelitian yang berbeda.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bertingkat bagi berbagai pihak. Bagi pihak sekolah, temuan dari penelitian ini dapat berfungsi

sebagai masukan konstruktif dan bahan evaluasi untuk mengoptimalkan penerapan sistem *e-budgeting*, memperkuat mekanisme akuntabilitas internal, serta mendorong peningkatan pelibatan *stakeholder* demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang lebih transparan.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan di wilayah Kota Tasikmalaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi isu transparansi keuangan dalam konteks pengelolaan dana pendidikan publik di tingkat daerah.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 7 bulan terhitung dari bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Mei 2026. Dengan rincian kegiatan seperti pada lampiran

1.